

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan terhadap semua hasil penelitian yang telah diperoleh setelah melakukan pengkajian, sekaligus memberikan analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam kesimpulan ini penulis akan memaparkan beberapa pokok pemikiran penting yang merupakan inti jawaban dari permasalahan yang telah dikaji, simpulan tersebut adalah sebagai berikut :

5.1 Simpulan

Di daerah Pecinan Kota Bandung yang terletak di Jalan Pecinan Lama, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Terdapat kelompok masyarakat etnis Tionghoa yang tinggal berkelompok disana membentuk sebuah komunitas kawasan Pecinan. Pecinan di Kota Bandung merupakan peninggalan dari masa Kolonial Hindia Belanda. Pada masa Kolonial Hindia Belanda masyarakat etnis Tionghoa yang merupakan masyarakat pendatang telah di eksklusifkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menempatkan etnis Tionghoa diatas pribumi. Sehingga proses identifikasi etnis pendatang itu cenderung berjalan lambat terhadap pribumi.

Hingga Indonesia merdeka, kecurigaan diantara keduanya masih tetap mengakar. Di dalam masa pembangunan ini, patutlah kita memikirkan untuk mengerahkan segala potensi yang ada pada bangsa Indonesia. Di dalam menghadapi suku-suku bangsa dan golongan minoritas yang banyak terdapat di Indonesia ini, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan potensi-potensi yang ada pada suku-suku bangsa atau golongan-golongan Tionghoa di Indonesia. Masalah yang pertama-tama dihadapi adalah masalah integrasi dari golongan itu. Hal ini penting untuk menjalin kerjasama yang harmonis antara golongan ini dengan orang Indonesia lainnya.

Di Indonesia, proses integrasi antara suku-suku bangsa memang sudah dimulai, tetapi masih terlampau lambat, antara lain karena kurang pengetahuan dan toleransi terhadap kebudayaan dari suku-bangsa atau golongan lain yang dihadapi dan karena perasaan superioritet pada individu-individu dari satu golongan terhadap golongan yang

lain. Bila sifat itu terus dipelihara maka akan sangat berbahaya untuk kelangsungan persatuan bangsa.

Karena sikapnya yang superioritet demikian masyarakat Tionghoa yang ada di kawasan Pecinan Kota Bandung kurang terbuka dengan lingkungan sekitarnya. Sikap partisipasi mereka terhadap program-program pemerintah yang ada dilingkungannya kurang di tanggapinya secara serius. Dalam hal ini, khususnya program keluarga berencana yang gencar diusahakan pemerintah saat itu. Pemerintah Presiden Soeharto tahun 1967 mencanangkan bahwa perlu adanya program pemecahan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB nasional. Keputusan itu sekaligus tindak lanjut dari kesepakatan internasional dalam Deklarasi Kependudukan PBB (1967) New York.

Keluarga berencana dalam arti membatasi kelahiran perlu dilaksanakan di daerah yang padat penduduknya, sedangkan bagi daerah yang masih luas tanahnya, KB berarti merencanakan kelahiran demi kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan keluarga. Dan KB juga merupakan salah satu jalan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pemerintah merasa program keluarga berencana ini sangat erat kaitannya dengan sarat pembangunan ekonomi. Akan tetapi yang terjadi adalah golongan etnis Tionghoa ini lebih peduli terhadap bisnis dan usahanya saja. Sikap eksklusif mereka telah membatasi proses integrasi bangsa didalamnya, khususnya antara Tionghoa dan pribumi. Semakin lama mereka untuk terbuka terhadap yang lain, maka kecurigaan diantara keduanya semakin menguat pula.

Kedudukan politik mereka juga di Indonesia kurang strategis. Sejarah Indonesia menggambarkan bahwa masyarakat etnis Tionghoa ini lebih mengutamakan bisnis daripada kepentingan politik, kecuali kepentingan politik itu menyangkut usaha dan bisnisnya. Mereka mendukung siapapun peminpinnya selama kepentingan-kepentingan ekonomi dan usahanya tidak terusik. Sikap tersebut didasari pula karena rasa nasionalisme mereka terhadap pemerintahan Indonesia yang lemah. Mereka masih ada kecenderungan menganggap bahwa mereka masih bagian dari negeri leluhurnya. Mereka menganggap dirinya di bumi Indonesia hanya sebagai kelompok pendatang, dan hanya sementara. Kelompok yang masih berfikiran seperti itu adalah para golongan Tionghoa totok yang umumnya fanatisme terhadap negeri leluhurnya masih kuat.

Adapun diantara mereka yang sikap politiknya sebagian telah berpihak terhadap pemerintah Indonesia adalah golongan Tionghoa peranakan yang umumnya lahir di

Indonesia. Tionghoa yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Tionghoa totok yang terdiri dari orang Tionghoa yang secara budaya masih Tionghoa. Tionghoa peranakan yang terdiri dari orang Tionghoa yang sudah terasimilasi sebagian kedalam masyarakat Indonesia.

Diantara Tionghoa peranakan inilah di kawasan Pecinan Kota Bandung tidak seluruhnya persepsi mereka menolak sistem KB. Ternyata Tionghoa peranakan ini menyadari manfaat-manfaat dari program KB tersebut. Hanya saja sifat eksklusif yang tadi diungkapkan masih membuat mereka bersifat tertutup. Mereka menggunakan KB Mandiri dengan dukungan ekonomi yang telah mapan dari usahanya. Mereka pergi ke dokter-dokter spesialis swasta dan umumnya sendiri-sendiri tanpa melalui petugas PLKB di lingkungannya. Hal demikian diakibatkan karena mereka belum percaya seluruhnya terhadap petugas PLKB di lapangan. Hal tersebut menandakan bahwa apresiasi sikap partisipasi mereka terhadap program pemerintah masih lemah. Dengan demikian perbaikan-perbaikan di dalam memberikan rasa yakin terhadap program KB ini perlu ditingkatkan lebih baik lagi. Selain dari upaya pemerintah dalam memberikan stimulus persepsi yang menjanjikan melalui berbagai macam media komunikasi, juga harus dibarengi dengan perbaikan-perbaikan di dalam memberikan pelatihan-pelatihan kemampuan dan profesionalitas para PLKB di lapangan.

Adapun faktor pendorong yang mempengaruhi partisipasi mereka terhadap program keluarga berencana adalah masa subur dan usia saat menikah; tingkat pendidikan yang maju; profesi wanita; dan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan. Sedangkan faktor yang bersifat menghambat terhadap program keluarga berencana adalah masih kuatnya tradisi lama; sikap politik menambah jumlah golongan; dan kelainan dalam penggunaan KB.

Masa subur dan usia saat menikah ikut menentukan keputusan dari para wanita Tionghoa untuk menggunakan alat kontrasepsi. Mengingat wanita memiliki batasan masa subur yakni usia 15 hingga 40 tahun. Dengan mempertimbangkan kemungkinan memiliki anak lagi di dalam masa tuanya hal tersebut bukanlah hal yang bisa ditangani dengan mudah. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menggunakan alat kontrasepsi dalam membatasi kehamilannya. Selain itu tingkat pendidikan yang mereka miliki juga ikut berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk menggunakan KB. Golongan yang berpendidikan dari golongan etnis Tionghoa ini menyadari pentingnya KB untuk

kesejahteraan keluarga mereka. Mereka lebih bisa menentukan secara kritis akan masadepan kehidupan keluarganya. Selain penjarangan kehamilan dapat memsejahterakan keluarga dari segi materi, program KB juga ikut mensejahterakan kesehatan Ibu dan Anak. Pada golongan masyarakat Tionghoa yang telah mendapat pendidikan menengah dan tinggi, serta dengan dibarengi kemampuan ekonomi tinggi. Mereka cenderung akan lebih banyak berpartisipasi dalam pelaksanaan cara-cara keluarga berencana. Akan tetapi golongan masyarakat Tionghoa yang berpendidikan rendah dan tingkat kehidupannya kurang berhasil, relatif partisipasinya terhadap cara-cara pelaksanaan program keluarga berencana sedikit sekali.

Selain tingkat pendidikan, pekerjaan dari wanita Tionghoa itu sendiri juga mempengaruhi keputusan untuk membatasi jumlah anak dalam keluarganya. Nampaknya, wanita yang memiliki pekerjaan diluar rumah akan mempertimbangkan ulang untuk memiliki banyak anak. Hal tersebut diakibatkan karena akan mengganggu efektivitas waktu yang dia butuhkan untuk pekerjaannya. Selain itu biaya pengeluaran untuk mempunyai anak dan mendidiknya jelas akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Menjamin kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan pendidikannya yang saat itu pendidikan Sekolah Dasar pun belum ada subsidi dari pemerintah, belum saat anak itu sakit, dan lain hal sebagainya. Maka atas dasar tekanan ekonomi inilah juga apabila memiliki banyak anak harus dipertimbangkan ulang.

Selain hal-hal diatas yang telah disebutkan, faktor penghambat dalam kehidupan sosial budaya juga ikut mempengaruhi keputusan-keputusan dalam melakuka praktek keluarga berencana. Diantaranya adalah masih kuatnya kehidupan tradisi lama. Pada umumnya semua golongan masyarakat Tionghoa baik yang telah mendapatkan pendidikan tinggi, menengah, apalagi pada tarap pendidikanya rendah. Faktor nilai-nilai pola kehidupan budaya lama, masih sangat memegang peranan penting. Hal tersebut menyebabkan partisipasi terhadap cara-cara KB belum didasarkan atas perhitungan yang objektif. Keadaan ini diperkuat dengan adanya struktur kehidupan kekeluargaan pola kehidupan tradisional kuno, dimana tugas dari seorang anak laki-laki harus mengurus abu leluhur. Sehingga memiliki anak laki-laki menjadi suatu keharusan untuk dapat dikatakan berbakti kepada leluhur mereka. dimana orang tua para pendukaung kebudayaan lama, yang mereka hormati masih ikut juga mengatur

kehidupan keluarga anaknya. Salah satunya memberikan persepsi yang negatif terhadap program KB.

Perlu diingat pula mereka di Indonesia ini merupakan entis pendatang, kemudian saat awal masa Orde Baru pemerintahan Soeharto sangat sensitif kecurigaannya terhadap golongan Tionghoa ini. Hal tersebut diakibatkan banyak kecurigaan mereka lebih berpihak kepada negeri leluhurnya, yaitu Tiongkok (komunis). Sehingga partisipasi golongan Tionghoa ini dibatasi dalam hal politik. Kuat dugaan golongan minoritas ini lebih berupaya untuk menambah jumlah golongannya, sehingga kekuatan politiknya semakin tinggi untuk mengimbangi pribumi.

Pada awal masa perintisan implementasi program KB, masih maraknya ditemukan kelainan yang diakibatkan ketidakcocokan saat memilih alat kontrasepsi seperti rambut rontok, tekanan darah menjadi tinggi, badan menjadi gemuk atau menjadi kurus kering, rusaknya kulit terutama pada muka hingga menyebabkan pendarahan. Hal demikian ikut mengakibatkan rasa takut dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan menggunakan alat kontrasepsi. Oleh karena keadaannya yang masih demikian, maka sebaiknya penerangan cara-cara pelaksanaan KB dipergiat dan diperluas. Baik secara formal maupun melalui lembaga-lembaga informal yang banyak hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian segala hambatan dan pertimbangan masyarakat yang bersifat negatif itu dapat berangsur-angsur dihindarkan. Demikian juga kesalahan penggunaan yang menimbulkan kelainan-kelainan pada akseptor juga dapat dihindarkan.

Fakta bahwa KB sampai saat ini bagi warga WNA Tionghoa tidak menjadi keharusan, dengan demikian harus ada upaya sistematis dan terarah agar masyarakat WNA Tionghoa yang ada di Pecinan Kota Bandung ikut juga melaksanakan KB. Diharapkan untuk kedepannya baik WNI maupun WNA Tionghoa akan merata melaksanakan KB dalam rangka ikut mengendalikan pertumbuhan penduduk, agar tidak terjadi ledakan penduduk di Indonesia.

5.2 Saran

1. Bagi Warga Etnis Tionghoa

Saran bagi warga etnis Tionghoa, khususnya yang ada di daerah Pecinan Kota Bandung hendaknya sebagai WNI bersedia untuk partisipasi dalam setiap program

pemerintah. Warga etnis Tionghoa harus mau membuka diri terhadap lingkungan. Sifat eksklusif yang melekat pada golongan etnis Tionghoa harus dihilangkan. Sebab pembauran sosial-budaya dengan meleburnya budaya para pendatang kedalam budaya bangsa Indonesia akan memperkuat kita sebagai bangsa yang majemuk. Selain itu warga etnis Tionghoa sendiri harus memiliki sifat dan sikap menghormati terhadap kultur budaya suatu bangsa, seperti dalam pepatah "dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung".

2. BKKBN

Kegiatan program KB dewasa ini telah melemah, hendaknya pemerintah melalui BKKBN menghidupkan kembali kejayaan KB yang dulu pernah bersinar. Sekarang program KB sudah tidak terdengar lagi. Pemerintah mulai lengah dengan kemungkinan terburuk terjadi ledakan penduduk. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah bukan tidak mungkin daya tampung negeri ini akan semakin habis.

Inovasi terhadap pelaksanaan program KB pada masyarakat Tionghoa juga harus ditingkatkan. Agar masyarakat Tionghoa merasa nyaman dalam mengikuti program-program yang diusahakan oleh pemerintah. Selain itu perlu adanya pembekalan PLKB mengenai pemahaman dalam sektor budaya tertentu yang khusus. Bila perlu PLKB yang bertugas adalah dari etnis Tionghoa itu sendiri. karena sektor yang paling penting adalah pekerja lapangannya yang menjadi ujung tombak dalam mengajak masyarakat turut aktif, serta kritis dalam program kependudukan ini.

3. Bagi Dunia Pendidikan

Hendaknya pengetahuan tentang "Pendidikan Kependudukan" yang dulu telah hilang dalam kurikulum pembelajaran dihidupkan kembali. Karena pada hakikatnya pengetahuan tentang pentingnya pengendalian penduduk harus di terapkan kepada masyarakat dari waktu sedini mungkin. Agara masyarakat pada umumnya memahami bahwa kematangan dalam membangun rumah tangga dan memutuskan untuk mempunyai anak harus di pertimbangkan dengan matang. Pemahaman sedini mungkin akan dapat membentuk masyarakat yang cerdas dan lebih dewasa dalam memasuki usia perkawinan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian membahas mengenai partisipasi masyarakat Tionghoa terhadap program Keluarga Berencana masih belum banyak dibahas, topik penelitian ini masih banyak yang harus digali lebih dalam lagi, terutama menyangkut sektor sosial-kulturalnya. Hal demikian itu dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.